



Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam Pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang

INFO PENULIS

Najwa Siti Fadhilah Chairul
Universitas Negeri Padang
najwafadhilah06@gmail.com
+6283809854170

Sinta Westika Putri
Universitas Negeri Padang
sintawestika@fis.unp.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Chairul, N. S. F., & Putri, S. W. (2026). Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam Pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. 6 (2), 2757-2764.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pejabat dan staf Bidang Kebudayaan, petugas museum, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, serta lima kelompok pengunjung sebagai triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta kerangka lima tahap Strategy Change Cycle Bryson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandat pengelolaan museum telah didukung regulasi dan Renstra; misi pengembangan diarahkan pada pelestarian, edukasi, dan rekreasi budaya; serta penilaian lingkungan telah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Strategi yang dijalankan mencakup konservasi, inventarisasi dan registrasi koleksi, kegiatan edukasi, kerja sama lintas pihak, promosi media sosial, dan digitalisasi secara bertahap. Faktor pendukungnya meliputi nilai sejarah dan budaya, keberagaman koleksi, dukungan pemerintah, kerja sama, dan posisi Bukittinggi sebagai kota wisata. Hambatannya adalah keterbatasan tenaga profesional, anggaran, registrasi dan digitalisasi, media interpretasi, ketentuan cagar budaya, serta promosi yang belum optimal. Strategi telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan indikator evaluasi, penguatan kompetensi, digitalisasi, promosi, dan kolaborasi yang lebih terarah.

Kata Kunci: Strategi; Pengembangan Museum; Bryson; Wisata Budaya; Bukittinggi

Abstrak

This study analyzes the strategy of the Bukittinggi City Education and Culture Office in developing the Rumah Adat Nan Baanjuang Museum and identifies its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants included officials and staff of the Culture Division, museum officers, the Bukittinggi City Tourism Office, and five visitor groups for source triangulation. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and Bryson's five-stage Strategy Change Cycle. The findings show that museum management is supported by regulations and the agency's strategic plan; its mission emphasizes cultural preservation, education, and cultural recreation; and its environmental assessment has identified organizational strengths, weaknesses, opportunities, and challenges. Implemented strategies include conservation, collection inventory and registration, educational activities, stakeholder collaboration, social media promotion, and gradual digitalization. Supporting factors include historical and cultural value, diverse collections, government support, partnerships, and Bukittinggi's position as a tourism city. Constraints include limited professional personnel and budget, incomplete registration and digitalization, limited interpretive media, restrictions associated with cultural heritage status, and suboptimal promotion. The strategy has been implemented reasonably well, but requires clearer evaluation indicators, stronger competencies, digitalization, promotion, and more structured cross-sector collaboration.

Kata Kunci: Strategy; Museum Development; Bryson; Cultural Tourism; Bukittinggi

A. Pendahuluan

Museum memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan identitas, nilai, dan pengetahuan budaya antargenerasi. International Council of Museums (ICOM, 2022) mendefinisikan museum sebagai lembaga permanen nirlaba yang melayani masyarakat melalui penelitian, pengumpulan, konservasi, interpretasi, dan pameran warisan berwujud maupun tidak berwujud. Definisi tersebut menempatkan museum bukan hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik, pendidikan, rekreasi, refleksi, dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan museum perlu mempertemukan fungsi pelestarian dengan kebutuhan pengunjung serta perubahan cara masyarakat memperoleh informasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan museum menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kewenangan tersebut berjalan bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Kejelasan mandat penting karena setiap program museum harus menjaga warisan budaya sekaligus menghasilkan manfaat pendidikan dan pelayanan bagi masyarakat.

Museum Rumah Adat Nan Baanjuang merupakan salah satu aset kebudayaan Kota Bukittinggi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi melalui Bidang Kebudayaan dan Seksi Permuseuman. Museum berbentuk rumah gadang ini berada di kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan serta menyimpan koleksi yang berkaitan dengan adat dan budaya Minangkabau, antara lain pakaian adat, peralatan tradisional, senjata, alat kesenian, dan benda bersejarah. Program pengembangannya tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 melalui kegiatan perlindungan dan pemanfaatan koleksi, pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat, pemeliharaan sarana-prasarana, serta revitalisasi museum (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021).

Data pengelola menunjukkan kunjungan meningkat tajam setelah tahun 2021, yaitu 106.889 kunjungan pada 2022, 114.225 pada 2023, 130.279 pada 2024, dan 132.015 pada 2025. Data 2026 tercatat 32.064 kunjungan sampai Mei, sedangkan data 2019 dan 2020 tidak mencakup satu tahun penuh sehingga perlu dibaca secara hati-hati. Tingginya angka kunjungan merupakan peluang, tetapi belum otomatis menunjukkan ketercapaian fungsi edukatif. Museum berada di

dalam kawasan kebun binatang berbayar, sedangkan masuk ke museum tidak dipungut biaya. Sebagian pengunjung memasuki museum sebagai bagian dari kunjungan ke kawasan, bukan karena sejak awal memiliki minat khusus terhadap museum. Situasi tersebut menuntut strategi yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga memperkuat pengalaman belajar, pemahaman koleksi, dan keterlibatan pengunjung.

Pengembangan museum juga menghadapi persoalan pengelolaan. Status bangunan sebagai cagar budaya menyebabkan revitalisasi fisik harus mengikuti ketentuan pelestarian dan tidak dapat dilakukan secara bebas. Dari 965 koleksi yang terdata, 300 telah diregistrasi dan 100 masih dalam proses pada 2026. Digitalisasi informasi koleksi belum menyeluruh, sedangkan tenaga profesional seperti konservator, registrator, dan edukator belum sepenuhnya tersedia. Pembinaan sumber daya manusia belum menjangkau seluruh petugas secara merata, dan sebagian program harus dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan anggaran. Pada sisi eksternal, promosi digital dan kolaborasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar museum lebih dikenal sebagai daya tarik wisata budaya yang berdiri dengan identitasnya sendiri.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan museum memerlukan keterpaduan antara pelestarian koleksi, interpretasi, pelayanan, sumber daya manusia, teknologi, dan kemitraan. Pradita (2018) menekankan penguatan fungsi edukasi dan pelayanan museum, sementara Junaid, Ilham, dan Saharuna (2022) menunjukkan pentingnya interpretasi koleksi dan kerja sama pemangku kepentingan dalam pariwisata edukasi. Wahyuni (2022) menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, pelayanan, dan kelembagaan masih menjadi persoalan penting dalam pengelolaan museum. Setyaningsih (2024) memperlihatkan bahwa media sosial dan inovasi program dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang melalui perspektif perencanaan strategis sektor publik masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan lima tahap Strategy Change Cycle Bryson (2007), yaitu identifikasi mandat organisasi, klarifikasi misi dan nilai, penilaian lingkungan internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, serta perumusan strategi. Kerangka tersebut membantu menilai hubungan antara kewenangan, tujuan organisasi, kondisi nyata, persoalan prioritas, dan pilihan program. Pandangan Suwanto (2004) digunakan sebagai teori pendukung untuk membaca museum sebagai daya tarik wisata budaya melalui aspek daya tarik, produk wisata, aksesibilitas, promosi, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Teori pendukung ini tidak menggantikan Bryson sebagai kerangka utama, tetapi memperkaya analisis terhadap dimensi pariwisata dalam pengembangan museum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang berdasarkan lima tahap Bryson serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian diharapkan memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelestarian budaya, fungsi edukasi, kualitas pelayanan, promosi, dan kolaborasi pengembangan museum.

B. Metodologi

1. Research Design

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perumusan dan pelaksanaan strategi pengembangan museum berdasarkan pengalaman serta pengetahuan para informan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, khususnya Bidang Kebudayaan, serta Museum Rumah Adat Nan Baanjuang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

2. Participants (Population and Sample)

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan museum. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Kebudayaan, Kepala Seksi Permuseuman, dua staf Bidang Kebudayaan, dua petugas Museum Rumah Adat Nan Baanjuang, serta Koordinator Pelayanan Bidang Daya Tarik Wisata dan Kawasan pada Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. Lima kelompok pengunjung digunakan sebagai informan triangulasi, yaitu pasangan wisatawan domestik lanjut usia, pelajar SMP, keluarga dengan anak usia sekolah dasar, wisatawan mancanegara, dan mahasiswa. Komposisi tersebut memungkinkan data dibandingkan antara pembuat kebijakan, pelaksana, mitra lintas instansi, dan pengguna layanan.

3. Technique of Data Collection

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan lima tahap Bryson serta pertanyaan mengenai faktor pendukung dan penghambat. Observasi mencakup kondisi bangunan, ruang pameran, koleksi, sarana pendukung, pelayanan, pencatatan pengunjung, dan posisi museum dalam kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Data sekunder diperoleh dari Renstra 2021-2026, dokumen program permuseuman, data kunjungan, Data Pokok Kebudayaan, dokumen revitalisasi, laporan kegiatan, peraturan, buku, dan artikel ilmiah. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, alat perekam, kamera, catatan lapangan, dan lembar telaah dokumen.

4. Data Validity

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Bungin, 2007). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi pejabat dan staf Bidang Kebudayaan, petugas museum, Dinas Pariwisata, serta lima kelompok pengunjung. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang berbeda ditelusuri kembali berdasarkan konteks informan dan bukti dokumen agar kesimpulan tidak hanya bertumpu pada satu sumber.

5. Technique of Data Analysis

Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan sesuai lima tahap Bryson. Temuan kemudian disajikan secara tematik, dibandingkan antarsumber, dan ditafsirkan dengan teori utama serta teori pendukung. Verifikasi dilakukan secara berulang selama pengumpulan dan analisis data untuk memastikan konsistensi antara pernyataan informan, hasil observasi, dan dokumen.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjung dilaksanakan melalui rangkaian kebijakan dan program yang berorientasi pada pelestarian budaya, edukasi, pelayanan, dan penguatan daya tarik wisata budaya. Temuan disusun berdasarkan lima tahap Strategy Change Cycle Bryson agar hubungan antara mandat, misi, kondisi lingkungan, isu strategis, dan strategi dapat terlihat secara sistematis.

Identifikasi Mandat Organisasi

Mandat pengelolaan museum telah memiliki dasar formal melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Museum belum berstatus UPTD sehingga kewenangan dan pembagian tugas masih berada langsung pada dinas melalui Bidang Kebudayaan dan Seksi Permuseuman. Yuliana, staf Bidang Kebudayaan, menjelaskan bahwa dasar pengelolaan mengacu pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan struktur yang ditetapkan dinas (wawancara, 23 Juni 2026). Kepala Seksi Permuseuman juga menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap bangunan harus mengikuti ketentuan cagar budaya. Mandat tersebut memberikan legitimasi sekaligus batasan: dinas berwenang mengembangkan museum, tetapi perubahan fisik harus tunduk pada prinsip pelestarian.

Klarifikasi Misi dan Nilai Organisasi

Arah pengembangan museum dipahami sebagai penguatan tiga fungsi, yaitu pusat pelestarian, pusat edukasi, dan pusat rekreasi budaya. Kepala Bidang Kebudayaan menyatakan bahwa museum harus menjadi media pembelajaran budaya Minangkabau bagi pelajar dan masyarakat, bukan hanya tempat penyimpanan koleksi (wawancara, 20 Juli 2026). Misi tersebut diwujudkan melalui konservasi, penyampaian informasi koleksi, kegiatan belajar bersama di museum, dan pelayanan pengunjung. Triangulasi dengan Dinas Pariwisata memperkuat posisi museum sebagai aset budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus potensi sebagai daya tarik wisata budaya. Dengan demikian, nilai yang mendasari program bukan semata peningkatan kunjungan, tetapi pelestarian, pendidikan, pelayanan publik, dan pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab.

Penilaian Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan internal museum terletak pada nilai sejarah bangunan, arsitektur rumah gadang, keberagaman koleksi Minangkabau, adanya struktur pengelola, dan kegiatan konservasi yang dilakukan berkala. Museum memiliki 965 koleksi terdata; 300 telah diregistrasi dan 100 masih dalam proses pada 2026. Data tersebut memperlihatkan kemajuan sekaligus beban kerja registrasi yang masih besar. Kelemahan internal meliputi keterbatasan tenaga profesional permuseuman, pembinaan yang belum merata, anggaran yang harus dibagi bertahap, informasi koleksi yang belum lengkap, dan digitalisasi yang belum menyeluruh. Seorang petugas baru mengakui belum pernah memperoleh pelatihan khusus dan masih belajar dari petugas yang lebih berpengalaman (wawancara, 15 Juni 2026).

Peluang eksternal berasal dari dukungan kebijakan pemerintah, Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan nonkonstruksi dan program permuseuman, kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas sejarah, AMIDA Sumatera Barat, serta potensi promosi melalui media sosial. Posisi Bukittinggi sebagai kota wisata juga memberi pasar pengunjung yang besar. Dinas Pariwisata menyebutkan adanya koordinasi dalam promosi wisata budaya, kegiatan daerah, penyebaran informasi destinasi, dan kegiatan lintas OPD (wawancara, 3 Agustus 2026). Tantangannya adalah ketentuan cagar budaya, posisi museum di dalam kawasan dengan objek wisata lain yang lebih dominan, persaingan perhatian wisatawan, promosi yang belum optimal, dan perilaku sebagian pengunjung yang kurang menjaga kebersihan serta tata tertib.

Identifikasi Isu Strategis

Penilaian lingkungan menghasilkan lima kelompok isu strategis. Pertama, kebutuhan tenaga konservasi, registrasi, edukasi, pelayanan, dan teknologi yang kompetensinya belum seluruhnya tersedia. Kedua, keterbatasan pembiayaan menyebabkan konservasi, registrasi, pemeliharaan, dan digitalisasi harus disusun berdasarkan prioritas. Ketiga, penyajian informasi koleksi belum cukup interaktif dan belum sepenuhnya menjangkau wisatawan mancanegara. Keempat, posisi museum di dalam kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan membuat identitas museum berpotensi tertutupi oleh objek wisata lain. Kelima, promosi digital dan kolaborasi lintas sektor belum terencana dalam program bersama yang berkelanjutan. Isu-isu ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan museum menjalankan fungsi edukasi dan memperkuat posisinya sebagai daya tarik wisata budaya.

Perumusan dan Pelaksanaan Strategi

Strategi yang telah dijalankan mencakup konservasi dan pemeliharaan bangunan serta koleksi, inventarisasi dan registrasi, program edukasi, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas, pemanfaatan media sosial, serta rencana digitalisasi informasi koleksi. Kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi diarahkan untuk memperluas kegiatan belajar, sedangkan kemitraan dengan AMIDA dan komunitas membantu kegiatan permuseuman. Dana Alokasi Khusus mendukung pengelolaan koleksi, edukasi, dan program nonkonstruksi, sementara pekerjaan fisik disesuaikan dengan kewenangan, ketentuan cagar budaya, dan ketersediaan APBD. Evaluasi dilakukan melalui laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban, tetapi belum terdapat instrumen operasional yang secara konsisten membandingkan setiap target Renstra dengan capaian, hambatan, tindak lanjut, dan penanggung jawab.

Triangulasi pengunjung menunjukkan bahwa fungsi edukasi telah dirasakan, tetapi kualitas interpretasi masih dapat ditingkatkan. Seorang pelajar SMP menyatakan bahwa kunjungan membuatnya lebih memahami budaya Minangkabau dibandingkan hanya membaca buku, sekaligus mengharapkan video, permainan edukasi, atau layar interaktif. Wisatawan mancanegara menilai arsitektur dan koleksi menarik, tetapi membutuhkan informasi berbahasa Inggris, kode QR, atau panduan audio. Mahasiswa menyarankan promosi media sosial dan informasi digital untuk menarik generasi muda. Dinas Pariwisata menilai strategi pelestarian, edukasi, dan kerja sama dengan sekolah telah berjalan cukup baik, namun promosi digital dan kolaborasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan (wawancara, 3 Agustus 2026).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pengembangan museum meliputi nilai sejarah dan budaya, keberagaman koleksi, kegiatan konservasi, struktur pengelolaan, dukungan kebijakan dan pendanaan, kemitraan dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas, AMIDA, dan Dinas Pariwisata, serta tingginya arus wisata di Kota Bukittinggi. Koleksi dan arsitektur menjadi modal utama bagi pengalaman belajar, sedangkan kerja sama membuka peluang pengembangan kegiatan edukatif

dan promosi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga profesional dan anggaran, belum selesainya registrasi, digitalisasi dan media interpretasi yang terbatas, ketentuan cagar budaya, posisi museum di dalam kawasan wisata lain, promosi yang belum optimal, serta kesadaran sebagian pengunjung terhadap kebersihan dan tata tertib.

Pembahasan

Tahap identifikasi mandat menunjukkan bahwa pengembangan museum memiliki legitimasi yang kuat. Menurut Bryson (2007), mandat menjelaskan apa yang wajib, boleh, dan tidak boleh dilakukan organisasi. Pada kasus Museum Rumah Adat Nan Baanjuang, mandat tidak hanya memberi kewenangan kepada dinas, tetapi juga membentuk batas strategis karena status cagar budaya membatasi perubahan fisik. Konsekuensinya, inovasi tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan bangunan baru. Inovasi harus lebih banyak diarahkan pada konservasi yang tepat, interpretasi koleksi, pelayanan, kegiatan edukatif, dan pemanfaatan teknologi yang tidak merusak nilai penting bangunan.

Klarifikasi misi memperlihatkan bahwa orientasi pelestarian, edukasi, dan rekreasi budaya telah dipahami oleh pengelola. Hal ini sesuai dengan Bryson (2007) yang menempatkan misi sebagai penjabar tujuan dasar organisasi dan nilai publik yang hendak diciptakan. Dalam organisasi publik, strategi yang baik harus berhubungan dengan manfaat masyarakat, bukan hanya capaian administratif (Keban, 2019). Karena itu, angka kunjungan yang tinggi perlu dilengkapi indikator kualitas, seperti pemahaman pengunjung, kepuasan, keterjangkauan informasi, partisipasi sekolah, dan keberlanjutan kondisi koleksi. Temuan ini sejalan dengan Pradita (2018) dan Junaid et al. (2022) bahwa penguatan edukasi serta interpretasi merupakan bagian penting dari pengembangan museum.

Penilaian lingkungan telah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang relevan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam ukuran evaluasi yang konsisten. Laporan kegiatan telah tersedia, tetapi evaluasi akan lebih kuat apabila setiap isu dikaitkan dengan indikator, target waktu, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan tindak lanjut. Hal ini penting karena perencanaan strategis sektor publik perlu menghubungkan strategi dengan manajemen kinerja agar pembelajaran organisasi tidak berhenti pada pelaporan kegiatan (Poister, 2010).

Isu strategis yang teridentifikasi saling berkaitan. Keterbatasan tenaga profesional memengaruhi registrasi, konservasi, edukasi, dan digitalisasi; keterbatasan anggaran memperlambat penanganan kebutuhan tersebut; sedangkan lemahnya interpretasi dan promosi membuat manfaat koleksi belum sepenuhnya terlihat oleh pengunjung. Dengan demikian, isu tidak seharusnya ditangani sebagai kegiatan yang terpisah. Pelatihan petugas, penyelesaian registrasi, pembuatan konten digital, dan promosi dapat dirancang sebagai satu rangkaian program berbasis koleksi prioritas. Pendekatan semacam ini sejalan dengan pandangan Mintzberg, Ahlstrand, dan Lampel (2009) bahwa strategi bukan hanya rencana, tetapi pola tindakan yang konsisten dalam penggunaan sumber daya.

Perumusan strategi telah merespons sebagian besar isu melalui konservasi, inventarisasi, registrasi, program edukasi, kerja sama, promosi media sosial, dan digitalisasi bertahap. Kekuatan strategi terletak pada kesesuaiannya dengan mandat pelestarian dan misi edukasi. Kelemahannya terletak pada belum terintegrasinya seluruh program ke dalam peta jalan yang terukur. Strategi perlu mengurutkan koleksi yang menjadi prioritas registrasi dan digitalisasi, menetapkan kelompok pengunjung sasaran, menentukan standar informasi koleksi, serta menghubungkan kegiatan edukasi dengan promosi dan evaluasi pengunjung.

Dalam perspektif Suwanto (2004), museum telah memiliki modal sebagai daya tarik wisata budaya berupa arsitektur autentik, koleksi Minangkabau, lokasi dalam kawasan wisata, dan fungsi edukasi. Namun daya tarik tersebut membutuhkan dukungan produk wisata yang terintegrasi, akses informasi, promosi, sumber daya manusia, serta kesadaran wisata. Temuan pengunjung mengenai kode QR, informasi berbahasa Inggris, media interaktif, dan promosi media sosial menunjukkan bahwa produk pengalaman museum belum sepenuhnya mengikuti kebutuhan wisatawan saat ini. Teori pendukung ini memperkuat analisis Bryson: promosi, aksesibilitas informasi, pelayanan, dan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata merupakan pilihan strategis yang perlu dilembagakan, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Secara keseluruhan, strategi Disdikbud telah melalui lima unsur utama Bryson, tetapi tingkat kematangannya berbeda pada setiap tahap. Mandat dan misi relatif jelas; pembacaan lingkungan serta identifikasi isu telah terlihat; sedangkan perumusan, integrasi program, dan evaluasi berbasis indikator masih perlu diperkuat. Temuan ini mendukung Wahyuni (2022) mengenai pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta Setyaningsih (2024)

mengenai perlunya inovasi digital untuk membangun keterlibatan generasi muda. Strategi pengembangan museum karenanya perlu bergerak dari pelaksanaan kegiatan tahunan menuju manajemen strategis yang menghubungkan pelestarian, edukasi, pariwisata budaya, teknologi, dan evaluasi dalam satu arah yang terukur.

D. Kesimpulan

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang telah mencerminkan lima tahap Strategy Change Cycle Bryson. Mandat pengelolaan didukung regulasi dan Renstra; misi diarahkan pada pelestarian, edukasi, dan rekreasi budaya; penilaian lingkungan telah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan; isu strategis telah diidentifikasi; serta strategi telah diwujudkan melalui konservasi, inventarisasi dan registrasi, program edukasi, kerja sama, promosi media sosial, dan digitalisasi bertahap. Pelaksanaannya dapat dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal karena evaluasi belum menggunakan indikator operasional yang konsisten, kapasitas sumber daya manusia belum merata, registrasi dan digitalisasi belum selesai, serta beberapa program masih bergantung pada kemampuan anggaran.

Faktor pendukung utama adalah nilai sejarah dan budaya, koleksi yang beragam, dukungan pemerintah, kegiatan konservasi, kemitraan, posisi Bukittinggi sebagai kota wisata, dan minat masyarakat. Faktor penghambatnya mencakup keterbatasan tenaga profesional, pembiayaan, media interpretasi, ketentuan cagar budaya, posisi museum di dalam kawasan objek wisata lain, promosi yang belum optimal, dan kesadaran sebagian pengunjung. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada peta jalan satu sampai tiga tahun yang memuat indikator, prioritas, penanggung jawab, anggaran, dan jadwal evaluasi; pelatihan petugas; percepatan registrasi dan digitalisasi; penyediaan kode QR serta informasi berbahasa Inggris; dan program kolaboratif dengan Dinas Pariwisata, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, serta organisasi permuseuman. Langkah tersebut penting agar kekuatan museum sebagai daya tarik wisata budaya dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih bermakna tanpa mengabaikan prinsip pelestarian cagar budaya.

E. Referensi

- Bryson, J. M. (2007). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026*. Bukittinggi.
- International Council of Museums. (2022). *ICOM Museum Definition*. <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>.
- Junaid, I., Ilham, M. D. M., & Saharuna, M. Y. (2022). Model Pengembangan Interpretasi Pariwisata Edukasi di Museum Kota Makassar. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 216-236. <https://doi.org/10.47608/jki.v16i22022.216-236>.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). *Strategy Safari: Your Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management* (2nd ed.). Harlow: Pearson Education.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poister, T. H. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance. *Public Administration Review*, 70(S1), S246-S254.
- Pradita, H. (2018). Strategi Pengembangan Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta sebagai Media Komunikasi Pendidikan. *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies*, 6(2).
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Setyaningsih, L. (2024). Implementasi Tren Media Sosial 'Museum Date' dalam Tata Pamer dan Pengembangan Program Museum Prasejarah sebagai Strategi Meningkatkan Kunjungan Gen-Z. *Prosiding Konferensi Nasional Prasejarah Indonesia 2024*, 167-176. <https://doi.org/10.55981/konpi.2024.144>.

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, G. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata (Edisi II). Yogyakarta: Andi.
- Wahyuni, S. (2022). Problematika Pengelolaan Museum Keris Nusantara: Sebuah Gagasan Mengenai Arah Pengembangan Museum. Jurnal Kajian Seni Budaya dan Permuseuman.